



BKD | BADAN
KEPEGAWAIAN
Provinsi Kalimantan Tengah | DAERAH



LAPORAN TRIWULAN II

APRIL – JUNI 2023



ADMINISTRASI PERSURATAN
/ PENYERAHAN BERKAS



KATA PENGANTAR

Pertama-tama puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Triwulan II Tahun Anggaran 2023.

Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah selama Tahun Anggaran 2023. Penyusunan Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026.

Penyusunan Laporan Triwulan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah merupakan bentuk kegiatan pemantauan perkembangan kinerja secara berkala yang bermanfaat dalam memberikan kepastian dan pengendalian pelaksanaan program yang sesuai dengan perencanaan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam rencana strategis.

Pada dasarnya laporan triwulan memuat hasil dan capaian kontrak kinerja pada tahun anggaran berjalan yang terbagi menjadi 4 (empat) periode yakni triwulan I, II, III, IV dan kemudian akan disusun menjadi LKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah). Sebagai penutup, segala hal yang termuat dalam laporan ini kiranya dapat memberi manfaat dalam pertimbangan dan keberlanjutan.

Palangka Raya, 01 Juli 2023

KERANGKA A BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BADAN
KEPEGAWAIAN
DAERAH
LISENDRARIYANA, S.Sos
Pembina Utama Madya
NIP.19680901 198911 2 005



A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B. Maksud dan Tujuan

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Triwulan II Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh BKD Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Mendorong BKD Provinsi Kalimantan Tengah di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi BKD Provinsi Kalimantan Tengah untuk meningkatkan kinerjanya;
4. Memberikan kepercayaan kepada ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka memberikan pelayanan, pengelolaan, dan pembinaan di bidang kepegawaian.

C. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II antara lain sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2. Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.
3. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor Tahun tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

D. Kedudukan, Tugas, Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Satuan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah merupakan penyelenggara Manajemen Aparatur Sipil Negara dan Pengelola Kepegawaian Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Kalimantan Tengah melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian.

E. Susunan Organisasi

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah terdiri atas beberapa fungsi yang memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing sebagai berikut :

1. Sekretariat

Mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif serta keuangan dan aset, kepegawaian, ketatausahaan, protokol, hubungan masyarakat dan rumah tangga, organisasi, tatalaksana serta dokumentasi peraturan perundang-undangan pada Badan Kepegawaian Daerah.

2. Bidang Pengolahan Data dan Pelayanan Informasi

Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan, dan pengolahan data serta, analisis dan penyajian informasi Badan Kepegawaian Daerah.

3. Bidang Pengembangan

Menyajikan bahan pedoman pengembangan karir dan kompetensi ASN, menyusun formasi ASN dan melaksanakan seleksi pengadaan CASN, seleksi Praja IPDN, Seleksi Tugas Belajar dan Izin Belajar, Pengakuan dan pencantuman gelar, dan Mutasi Jabatan.

4. Bidang Mutasi

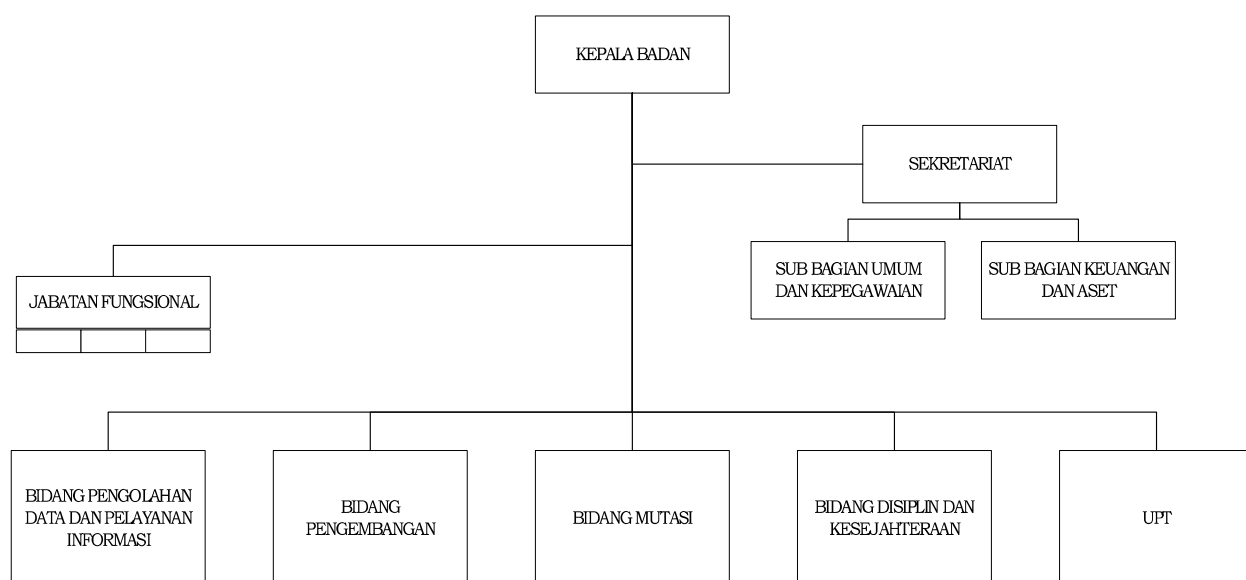
Merumuskan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan menyiapkan bahan dan memproses mutasi pindah ASN, mutasi kenaikan pangkat, sumpah janji, pengangkatan ASN dan pengusulan Kartu Pegawai, Peninjauan Masa Kerja ASN, ujian dinas tingkat I dan tingkat II, ujian penyesuaian ijazah, pemberhentian dan pensiun ASN Daerah.

5. Bidang Disiplin dan Kesejahteraan

Menyiapkan bahan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian untuk proses kedudukan hukum pegawai, pembinaan disiplin dan penyelesaian pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil, melakukan pembinaan ASN melalui peningkatan kesejahteraan, pembinaan kebugaran jasmani, seni budaya serta pembinaan mental kerohanian ASN lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Untuk lebih jelas mengenai susunan struktur organisasi pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 0-1 Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023



F. Aspek Strategis

Dalam rangka mendukung upaya pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dituntut untuk ikut berpartisipasi dalam pencapaian **Misi Ketiga** yaitu **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Reformasi Birokrasi**. Dalam lingkup bidang kepegawaian, misi ini mengisyaratkan perlunya BKD selaku unsur penunjang urusan pemerintahan pada pelayanan kepegawaian untuk melakukan reformasi birokrasi pada bidang manajemen ASN.

Terkait dengan profesionalitas ASN, pelaksanaan sistem merit pada manajemen ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah masih belum dapat terlaksana secara optimal. Selanjutnya, hirarki eselonisasi saat ini terdiri dari 5 level membuat proses pengambilan keputusan tidak efisien, sehingga perlu penyederhanaan eselonisasi serta perluasan jabatan fungsional dengan keahlian dan kompetensi yang semakin spesifik.

Dari sisi kompetensi, jumlah tenaga spesialis di lingkungan ASN masih kurang, serta rendahnya kompetensi dan tingkat pendidikan ASN. Dari sisi distribusi, persebaran ASN dengan keahlian tertentu/fungsional belum berbasiskan sektor unggulan kewilayahan. Dari sisi kesejahteraan, perlu terus diupayakan perbaikan sistem kesejahteraan ASN dan pensiunan ASN. Dari aspek regulasi, perlu percepatan penerbitan peraturan pelaksana UU No.5/2014 tentang ASN pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Penentuan isu-isu strategis mutlak menjadi bagian dalam suatu proses perencanaan. Keberhasilan mengidentifikasi isu-isu strategis dengan tepat pada gilirannya akan membuat perencanaan disusun menjadi tepat sasaran, efektif, dapat diterima oleh pihak-pihak terkait, dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis



Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah memiliki indikator kinerja yang akan dicapai dalam periode 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah. Berikut ini adalah indikator kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase Kualitas Manajemen ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	-	80%	83%	85%	88%	90%	95%	95%
	Persentase Pegawai Perangkat Daerah dengan data kepegawaian yang terintegrasi dan up to date	-	85%	85,00%	90,00%	95,00%	100,00%	100,00%	100,00%

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Persentase Pegawai Sesuai dengan Kebutuhan Instansi	-	65%	70,00%	75,00%	80,00%	85,00%	90,00%	90,00%
	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	-	60%	65,00%	70,00%	75,00%	80,00%	85,00%	85,00%
	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	-	54	54	54	54	54	54	54
	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	-	1006	1006	1010	1013	1015	1017	1017
	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	-	5800	6000	6200	6400	6600	6800	6800
	Indeks Profesionalitas ASN pada Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	-	75,00	75,50	76,00	77,70	78,00	78,50	78,50
	Persentase Penurunan Pelanggaran Disiplin ASN	-	0	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%
	Persentase Usulan Pelayanan Kepegawaian yang ditindaklanjuti secara tepat waktu	-	80%	80,00%	85,00%	85,00%	90,00%	95,00%	95,00%
	Persentase ASN yang lulus dalam pengukuran kompetensi ASN	-	70,00%	70,00%	72,00%	72,00%	75,00%	75,00%	75,00%

Adapun formulasi masing-masing indikator kinerja utama pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dijabarkan pada tabel berikut :

*Tabel VII.1 Formulasi Indikator Kinerja Utama
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah*

No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA	KETERANGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Persentase Pegawai Perangkat Daerah dengan data kepegawaian yang terintegrasi dan up to date	Persentase	$\frac{\text{Jumlah pegawai perangkat daerah dengan data kepegawaian yang sudah terintegrasi, valid dan update}}{\text{Jumlah pegawai perangkat daerah secara keseluruhan}} \times 100\%$	SIMPEG Kalteng
2	Persentase Pegawai Sesuai dengan Kebutuhan Instansi	Persentase	$\frac{\text{Jumlah formasi jabatan yang sudah terisi}}{\text{Jumlah Kebutuhan Pegawai}} \times 100\%$	Dokumen Bezzeting Formasi Instansi Pemprov Kalteng, Dokumen Laporan Kegiatan Seleksi CPNS, Dokumen Anjab ABK Pemprov Kalteng
3	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Persentase	$\frac{\text{Jumlah ASN yang melanjutkan pendidikan Tugas Belajar dan Izin Belajar}}{\text{Jumlah Kebutuhan Tugas Belajar dan Izin Belajar Instansi}} \times 100\%$	Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Tugas Belajar dan Izin Belajar, Dokumen Rencana Kebutuhan Tugas Belajar dan Izin Belajar
4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Orang	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi yang terisi pada Instansi Pemprov Kalteng	SIMPEG Kalteng
5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Orang	Jumlah Jabatan Administrasi yang terisi pada Instansi Pemprov Kalteng	SIMPEG Kalteng
6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Orang	Jumlah ASN yang telah diangkat dengan Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemprov Kalteng	SIMPEG Kalteng
7	Indeks Profesionalitas ASN pada Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Indeks	Skor yang didapatkan berdasarkan pada Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	SAPK BKN

No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA	KETERANGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
8	Persentase Penurunan Pelanggaran Disiplin ASN	Persentase	$\left(\frac{\text{Jumlah Kasus Pelanggaran Disiplin pada tahun } (n - 1)}{\text{Jumlah Seluruh Pegawai pada tahun } (n - 1)} \times 100\% \right)$ <p style="text-align: center;">dikurangi</p> $\left(\frac{\text{Jumlah Kasus Pelanggaran Disiplin pada tahun } (n)}{\text{Jumlah Seluruh Pegawai pada tahun } (n)} \times 100\% \right)$	Dokumen Laporan Tindak Lanjut Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin ASN
9	Persentase Usulan Pelayanan Kepegawaian yang ditindaklanjuti secara tepat waktu	Persentase	<p>Usulan Layanan Kepegawaian dimaksud meliputi : Tugas Belajar, Izin Belajar, Jabatan Fungsional, Kenaikan Pangkat, Mutasi, Pencantuman Gelar, Karis/Karsu, Usul Satyalencana Karya Satya, SKP Eselon II, Perbaikan/Update Data, Cuti, dan Pensiun (Layanan Kepegawaian dalam aplikasi TAGUHBKD)</p> $\frac{\text{Jumlah usulan layanan kepegawaian yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah semua usulan layanan kepegawaian yang masuk ke BKD dalam satu tahun}} \times 100\%$	Aplikasi SITAGUH BKD
10	Persentase ASN yang lulus dalam pengukuran kompetensi ASN	Persentase	<p>Pengukuran Kompetensi ASN dimaksud meliputi Ujian Dinas Kenaikan Pangkat, Ujian Penyesuaian Ijazah, Asesmen Mutasi, serta Seleksi Terbuka JPT dan Job Fit</p> $\frac{\text{Jumlah ASN yang lulus}}{\text{Jumlah peserta keseluruhan}} \times 100\%$	Dokumen Laporan Kegiatan Pelaksanaan Ujian Dinas Kenaikan Pangkat, Ujian Penyesuaian Ijazah, Asesmen Mutasi, serta Seleksi Terbuka JPT dan Job Fit

B. Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja

Indikator Kinerja Utama merupakan suatu tolak ukur yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi. Berdasarkan dokumen penetapan Indikator Kinerja Utama BKD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, terdapat 1 (satu) sasaran strategis dan 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Utama dengan rincian sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA BKD TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Pelayanan Kepegawaian yang Prima dan Profesional	Presentase Pegawai Perangkat Daerah dengan data kepegawaian yang terintegrasi dan up to date	Persentase	90%
		Presentase Pegawai Sesuai dengan Kebutuhan Instansi	Persentase	75%
		Presentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan formal	Persentase	70%
		Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintahan	Orang	54
		Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintahan	Orang	1010
		Jumlah Pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintahan	Orang	6200
		Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	76
		Persentase Penurunan Pelanggaran Disiplin ASN	Persentase	0.10%
		Persentase Usulan Pelayanan Kepegawaian yang ditindaklanjuti secara tepat waktu	Persentase	85%
		Persentase ASN yang lulus dalam pengukuran kompetensi ASN	Persentase	72%

BAB III CAPAIAN KINERJA TRIWULAN

A. Capaian Kinerja BKD

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Bapak Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2023.

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Capaian Triwulan II			Ket
					Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Pelayanan Kepegawaian yang Prima dan Profesional	Persentase Kualitas Manajemen ASN Provinsi Kalimantan Tengah						
		Persentase Pegawai Perangkat Daerah dengan data kepegawaian yang terintegrasi dan up to date	persentase	90%	90%	87%	96,67%	
		Persentase Pegawai Sesuai dengan Kebutuhan Instansi	persentase	75%	75%	61%	81,33%	
		Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	persentase	70%	70%	67%	95,71%	
		Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	orang	54	54	43	79,63%	

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Capaian Triwulan II			Ket
					Target	Realisasi	Capaian (%)	
		Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	orang	1010	1010	3201	316,93%	
		Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	orang	6200	6200	5197	83,82%	
		Indeks Profesionalitas ASN	indeks	76	76	71,86	94,55%	
		Persentase penurunan Pelanggaran Disiplin ASN	persentase	0.10%	0.10%	0.00%	0,00%	
		Persentase usulan pelayanan kepegawaian yang ditindaklanjuti secara tepat waktu	persentase	85%	85%	85%	100,00%	
		Persentase ASN yang lulus dalam pengukuran kompetensi ASN	persentase	72%	72%	0%	0,00%	kegiatan terkait belum dilaksanakan

B. Realisasi Keuangan BKD

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan			Keterangan
					Target	Realisasi	Capaian (%)	
	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH			16.816.733.914	16.816.733.914	6.513.056.313	38,73%	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			12.078.840.795	12.078.840.795	5.804.574.173	48,06%	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		125.286.224	125.286.224	25.467.800	20,33%	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	48.321.000	48.321.000	13.300.200	27,52%	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	76.965.224	76.965.224	12.167.600	15,81%	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			6.936.930.459	6.936.930.459	2.917.359.065	42,06%	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.909.537.459	6.909.537.459	2.917.359.065	42,22%	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13.864.000	13.864.000			
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan /Semesteran SKPD	13.529.000	13.529.000			
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			23.418.000	23.418.000	-	0,00%	
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	23.418.000	23.418.000			
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			102.990.000	102.990.000	43.590.000	42,32%	

N o.	Progra m	Kegiat an	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan			Keteran gan
					Target	Realisasi	Capaian (%)	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	43.590.000	43.590.000	43.590.000	100,00%	
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	59.400.000	59.400.000			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		2.875.267.107	2.875.267.107	2.211.317.000	76,91%	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	27.900.000	27.900.000	12.500.000	44,80%	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.244.789.747	2.244.789.747	1.924.040.500	85,71%	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	75.976.500	75.976.500	44.838.900	59,02%	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	35.000.000	35.000.000	6.480.000		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	491.600.860	491.600.860	223.457.600	45,46%	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		20.000.000	20.000.000	-		
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000	20.000.000			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.326.599.255	1.326.599.255	482.576.689	36,38%	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	461.719.255	461.719.255	165.440.689	35,83%	
			Penyediaan Jasa		864.880.00		36,67%	

N o.	Progra m	Kegiat an	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan			Keteran gan
					Target	Realisasi	Capaian (%)	
			Pelayanan Umum Kantor	864.880.000	0	317.136.000		
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	668.349.750	668.349.750	124.263.619	18,59%	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	264.800.000	264.800.000	110.063.619	41,56%	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.250.000	27.250.000	300.000		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	355.949.750	355.949.750	13.900.000		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.350.000	20.350.000			
2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			4.737.893.119	4.737.893.119	708.482.140	14,95%	
			Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	2.987.357.620	2.987.357.620	421.264.292	14,10%	
			Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	240.483.400	240.483.400	18.226.200		
			Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	77.609.000	77.609.000	16.217.100		
			Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	2.218.114.620	2.218.114.620	135.634.000	6,11%	
			Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	50.783.000	50.783.000	3.942.662		
			Pengelolaan Data		400.367.60		61,75%	

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan			Keterangan
					Target	Realisasi	Capaian (%)	
			Kepegawaian	400.367.600	0	247.244.330		
			Mutasi dan Promosi ASN	1.468.767.600	1.468.767.600	255.819.098	17,42%	
			Pengelolaan Mutasi ASN	49.043.000	49.043.000			
			Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	143.524.600	143.524.600	12.209.950	8,51%	
			Pengelolaan Promosi ASN	1.276.200.000	1.276.200.000	243.609.148	19,09%	
			Pengembangan Kompetensi ASN	75.221.900	75.221.900	7.805.000		
			Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	40.791.700	40.791.700	2.165.000		
			Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	34.430.200	34.430.200	5.640.000		
			Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	206.545.999	206.545.999	23.593.750	11,42%	
			Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	83.295.999	83.295.999	12.918.950		
			Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	103.250.000	103.250.000	10.674.800	10,34%	
			Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	20.000.000	20.000.000	7.125.000		

Secara umum, pencapaian target kinerja pada Triwulan II pada tahun 2023 masih dalam proses pencapaian target. Selain itu telah dilakukan kegiatan inovatif dan kegiatan yang diperbaharui dalam pelayanan publik oleh Kepala BKD / PNS di jajaran Pemprov Kalteng.

Kerjasama antar unit dilingkungan internal Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah salah satu kunci keberhasilan dalam menyelenggarakan kinerja yang optimal. Oleh karena itu, hal ini perlu menjadi nilai-nilai organisasi yang bertumbuh dan berkembang. Demikian Laporan Triwulan II ini disusun sebagai instrumen monitoring kinerja dan harapannya dapat dipergunakan dengan baik untuk evaluasi dan perbaikan kinerja pada periode-periode mendatang.